PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENANGANAN KONFLIK ETNIK DI KOTA KENDARI (STUDI PADA ETNIK SUKU TOLAKI DAN MUNA)

Riska Rianti
NPP. 33.0983
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: riantiriska88@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos., M.Si.
Email: baharthahir6@gmail.com

ABSRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the recurring potential for ethnic conflict between the Tolaki and Muna ethnic groups in Kendari City. Although Kendari is known as a multicultural city with relatively harmonious social relations, conflicts triggered by misunderstandings, social competition, and provocations related to ethnic identities continue to occur. Meanwhile, the Regional National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) is responsible for maintaining social stability and fostering interethnic harmony. Therefore, it is important to examine the role of Kesbangpol in preventing and managing ethnic conflicts between the Tolaki and Muna ethnic groups in Kendari City.* ***Purpose:*** *This study aims to determine the role of the Regional National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in preventing and managing ethnic conflicts between the Tolaki and Muna ethnic groups in Kendari City.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive method and analyzes the role of Kesbangpol based on Role Theory proposed by J. Dwi Narwoko. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving the Head of Kesbangpol Kendari City, the Head of the National Vigilance and Conflict Management Division, leaders of Tolaki and Muna ethnic organizations, an academic from Halu Oleo University, individuals who had directly experienced ethnic conflict, and members of the community. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *This study found that Kesbangpol Kendari City plays an active role in managing ethnic conflicts between the Tolaki and Muna ethnic groups through three distinct mechanisms. In the social control dimension, Kesbangpol conducts early detection of potential conflicts, disseminates national values programs, and coordinates with stakeholders to maintain social stability. In the social integration dimension, Kesbangpol facilitates dialogue, mediation, and community-based activities involving traditional leaders and ethnic organizations to strengthen interethnic relations. In the social integration dimension, Kesbangpol facilitates dialogue, mediation, and community-based activities involving traditional leaders, community leaders, and ethnic organizations to strengthen communication and interethnic relations. In the social order dimension, Kesbangpol acts as a*

mediator and coordinator in conflict resolution through deliberative approaches and collaboration with the military, police, and other related institutions to prevent wider conflict escalation. These efforts contribute to maintaining harmony and reducing the risk of ethnic tensions within the community. ***Conclusion:*** *This study concludes that Kesbangpol Kendari City has performed its role effectively in preventing and managing ethnic conflicts between the Tolaki and Muna ethnic groups through social control, social integration, and social order functions. It is recommended that Kesbangpol strengthen human resource capacity, improve institutional support, and enhance public awareness regarding ethnic tolerance and responsible use of social media.*
Keywords: *Ethnic Conflict; Kendari City; Kesbangpol; Muna Ethnic Group; Tolaki Ethnic Group*

ABSTRAK

Permasalahan *(Research Gap):* Kota Kendari merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagaman etnik yang tinggi, khususnya antara suku Tolaki dan Muna. Meskipun kehidupan sosial masyarakat relatif harmonis, konflik etnik masih berpotensi terjadi dan berulang akibat kesalahpahaman, persaingan sosial, serta provokasi melalui media sosial yang menyinggung identitas kelompok. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari memiliki tugas dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Kesbangpol dalam pencegahan dan penanganan konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari dalam pencegahan dan penanganan konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan analisis berdasarkan teori peran menurut J. Dwi Narwoko. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas Kepala Badan Kesbangpol Kota Kendari, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, ketua organisasi masyarakat suku Tolaki dan Muna, akademisi Universitas Halu Oleo, individu yang pernah mengalami konflik secara langsung, serta masyarakat Kota Kendari. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Kesbangpol Kota Kendari dalam pencegahan dan penanganan konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna telah dilaksanakan melalui beberapa dimensi peran. Pada dimensi pengendalian sosial, Kesbangpol melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga stabilitas sosial. Pada dimensi mempererat hubungan sosial, Kesbangpol memfasilitasi dialog, mediasi, dan kegiatan yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan guna memperkuat komunikasi dan harmonisasi antar-etnik. Sementara itu, pada dimensi menjaga keteraturan sosial, Kesbangpol berperan sebagai mediator dan koordinator dalam penyelesaian konflik melalui

pendekatan persuasif, musyawarah, serta kerja sama dengan TNI, Polri, dan lembaga terkait untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesbangpol Kota Kendari telah berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna melalui fungsi pengendalian sosial, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keteraturan sosial guna menciptakan stabilitas serta kerukunan masyarakat. Adapun saran penelitian ini yaitu perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran program, serta pengembangan edukasi literasi digital kepada masyarakat untuk mendukung efektivitas pencegahan konflik etnik.
Kata Kunci: Kendari; Kesbangpol; Konflik Etnik; Muna; Tolaki

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan nasional apabila dikelola secara baik dan bijaksana. Namun, di sisi lain, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila terdapat perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, maupun sentimen kelompok yang berkembang di masyarakat (Adolph, 2016)

Konflik sosial berbasis etnik masih menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Beberapa konflik yang pernah terjadi seperti konflik Dayak-Madura di Kalimantan, konflik Ambon di Maluku, dan konflik Poso di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa perbedaan identitas etnik dan kelompok dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang berdampak terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat (Sumantri et al., 2017)

Konflik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor identitas etnik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesenjangan sosial, persaingan ekonomi, lemahnya komunikasi antar kelompok, serta kebijakan yang belum mampu mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut (Liliweri, 2005), etnik merupakan kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, nilai, norma, dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat multietnis, interaksi yang berlangsung secara intensif dapat menghasilkan integrasi sosial, namun juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disertai dengan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

Penanganan konflik sosial pada masyarakat multietnis memerlukan keterlibatan berbagai aktor pemerintahan secara terpadu. Agus Subagyo dan Yudi Rusfiana dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjelaskan bahwa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat merupakan faktor penting dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial di daerah multikultural. (Agus Subagyo, 2018)

Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat keberagaman etnik yang tinggi. Masyarakat Kota Kendari terdiri atas berbagai kelompok etnik seperti Tolaki,

Muna, Buton, Bugis, Makassar, Jawa, dan etnik lainnya yang hidup berdampingan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sosial budaya yang dapat mendukung pembangunan daerah, namun juga memiliki potensi konflik apabila tidak dikelola secara efektif (BPS Kota Kendari, 2024).
Dalam beberapa tahun terakhir, konflik horizontal berbasis etnik masih terjadi di Kota Kendari, khususnya yang melibatkan kelompok masyarakat suku Tolaki dan Muna. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, konflik etnik terjadi secara berulang sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 dengan berbagai bentuk kejadian, mulai dari bentrokan antar pemuda, konflik di lingkungan kampus, aksi demonstrasi, hingga konflik yang dipicu oleh unggahan media sosial yang dianggap menghina identitas etnik tertentu (Kesbangpol Kota Kendari, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memengaruhi dinamika konflik etnik di Kota Kendari. Jika sebelumnya konflik lebih banyak dipicu oleh interaksi langsung antar kelompok masyarakat, saat ini konflik juga dapat dipicu oleh penyebaran ujaran kebencian, provokasi, dan informasi yang menyinggung identitas kelompok tertentu melalui media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan konflik pada era digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan komunikasi sosial, pendidikan toleransi, literasi digital, serta deteksi dini terhadap potensi konflik.

Peran tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola berbagai persoalan sosial termasuk konflik berbasis identitas. Menurut Soemaatmadja, Supriatna, Rowa, dan Kusworo dari IPDN, keberhasilan penanganan konflik sosial sangat dipengaruhi oleh efektivitas kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (Soemaatmadja et al., 2020)

Kesbangpol bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dini konflik, melaksanakan mediasi, membangun komunikasi antar kelompok masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Peran tersebut menjadi penting mengingat konflik etnik yang tidak tertangani secara baik dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Etnik antara Suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat multietnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik sosial dan penguatan integrasi masyarakat di daerah multikultural.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Penulis berfokus pada permasalahan masih terjadinya konflik horizontal berbasis etnik antara suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari meskipun

pemerintah daerah melalui Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan konflik. Data konflik menunjukkan bahwa konflik etnik masih terjadi secara berulang dalam berbagai bentuk, baik yang dipicu oleh kesalahpahaman antar kelompok masyarakat, saling ejek dalam kegiatan publik, aksi balas dendam, maupun provokasi melalui media sosial (Kesbangpol Kota Kendari, 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan konflik sosial. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi masyarakat, tetapi juga menjadi media penyebaran ujaran kebencian dan provokasi yang berpotensi memicu konflik etnik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi konflik sosial di Kota Kendari masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konflik sosial dan konflik etnik di Indonesia, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari dalam mencegah dan menangani konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

1. Fokus Institusi: Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konflik sosial secara umum, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis peran Kesbangpol sebagai lembaga pemerintah daerah.
2. Kerangka Teoretis: Penelitian ini menggunakan Teori Peran J. Dwi Narwoko yang menganalisis fungsi peran dalam pengendalian sosial, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keteraturan sosial—perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan teori resolusi konflik atau manajemen konflik.
3. Konteks Spesifik: Penelitian ini mengkaji konflik etnik Tolaki-Muna di Kota Kendari, daerah yang memiliki karakteristik demografis dan dinamika konflik yang unik dan belum banyak dikaji secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan dan berkontribusi pada pengembangan strategi penanganan konflik etnik di daerah multietnis.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari dalam mencegah dan menangani konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas sosial masyarakat multietnis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan. (Imran Tahir & M. Irwan Tahir, 2020)

Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari menunjukkan bahwa konflik horizontal berbasis etnik masih terjadi secara berulang di Kota Kendari sejak tahun 2008 hingga 2024, dengan berbagai bentuk kejadian yang terus berkembang—mulai dari bentrokan antar pemuda, konflik di lingkungan kampus, aksi demonstrasi, hingga konflik yang dipicu oleh unggahan media sosial yang dianggap menghina identitas etnik tertentu. Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru, di mana media sosial

tidak hanya menjadi sarana komunikasi masyarakat tetapi juga medium penyebaran ujaran kebencian dan provokasi yang berpotensi memicu eskalasi konflik dengan cepat dan massif.

Meskipun pemerintah daerah melalui Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan konflik, konflik masih terjadi secara berulang dalam berbagai bentuk. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas peran Kesbangpol dan strategi penanganan konflik yang diterapkan saat ini.

Penelitian empiris mengenai peran Kesbangpol Kota Kendari dalam penanganan konflik etnik masih terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berlandaskan pada data empiris serta pemahaman mendalam tentang mekanisme konflik dan upaya penanganannya di lapangan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas konflik etnik, konflik sosial, perdamaian masyarakat multikultural, serta peran pemerintah dan institusi lokal dalam menjaga stabilitas sosial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian konflik sosial dan etnik memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan penyebab, dinamika, dan upaya penanganan konflik. Barron, Kaiser, dan Pradhan mengkaji variasi konflik lokal di Indonesia menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan analisis statistik dan studi lapangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa konflik lokal di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketimpangan sosial, serta karakteristik lokal masing-masing daerah, sehingga penanganan konflik memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat, (Barron, 2004)

Selanjutnya, Mustarini Dessy Vitiara, Herdis Herdiansyah, dan Evi Frimawaty meneliti peran komunitas lokal dalam mengatasi konflik sosial yang muncul akibat kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal memiliki peran penting dalam mengurangi potensi konflik serta membangun ketahanan sosial masyarakat. (Vitiara et al., 2025)

Penelitian oleh Rohman dkk. membahas peran masyarakat lokal dalam proses *peacebuilding* pasca konflik etnik di masyarakat multikultural Indonesia menggunakan metode survei terhadap wilayah yang pernah mengalami konflik etnik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal, toleransi sosial, dan komunikasi antar kelompok menjadi faktor penting dalam menjaga perdamaian pascakonflik. (Hartoyo et al., 2020)

Gunawan, Taufik, dan Somlai meneliti fragmentasi dan polarisasi etnik di Ibu Kota Nusantara (IKN) menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis konflik potensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya keberagaman etnik tanpa pengelolaan yang baik berpotensi meningkatkan konflik sosial sehingga diperlukan peran pemerintah dalam membangun integrasi sosial dan mitigasi konflik sejak dini.(Gunawan et al., 2024)

Bolombo mengkaji implementasi kebijakan penanganan konflik sosial oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan penanganan konflik dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. (Ahmad & Bolombo, 2021)

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan dominasi kajian mengenai konflik sosial, konflik etnik, *peacebuilding,* kapasitas kelembagaan, serta implementasi kebijakan penanganan konflik dengan berbagai pendekatan metodologis. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam kajian yang telah dilakukan. Pertama, sebagian besar penelitian membahas penanganan konflik dari perspektif umum atau melibatkan berbagai aktor secara bersama-sama, sehingga belum secara spesifik mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Kedua, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan resolusi konflik, manajemen konflik, *peacebuilding*, atau implementasi kebijakan, sementara penggunaan Teori Peran J. Dwi Narwoko untuk menganalisis fungsi institusi pemerintah dalam konflik etnik masih relatif terbatas. Ketiga, kajian yang secara khusus menyoroti konflik etnik antara suku Tolaki dan suku Muna di Kota Kendari juga masih jarang ditemukan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji secara komprehensif tahapan penanganan konflik yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik dalam satu kesatuan analisis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian tersebut serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai peran Kesbangpol dalam menangani konflik etnik, khususnya dalam mewujudkan pengendalian sosial, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keteraturan sosial pada masyarakat multietnis di Kota Kendari.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari dalam pencegahan dan penanganan konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas konflik sosial secara umum, penelitian ini menempatkan Kesbangpol sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat multietnis. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Peran dari J. Dwi Narwoko yang menekankan fungsi peran dalam pengendalian sosial, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keteraturan sosial. Penggunaan teori tersebut memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis peran pemerintah daerah dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan teori resolusi konflik atau manajemen konflik.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Kota Kendari dalam pencegahan dan penanganan konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari dalam mencegah dan menangani konflik etnik antara suku Tolaki dan Muna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, strategi, serta dinamika yang dilakukan Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antar etnik di Kota Kendari. Selain itu, pendekatan kualitatif dinilai tepat karena fenomena konflik etnik merupakan peristiwa sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi para informan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terkait pencegahan dan penanganan konflik etnik di Kota Kendari. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Kendari, Ketua Organisasi Masyarakat Suku Tolaki, Ketua Organisasi Masyarakat Suku Muna, akademisi Universitas Halu Oleo yang memiliki kompetensi dalam kajian konflik sosial dan etnik, individu yang pernah mengalami konflik secara langsung, serta masyarakat Kota Kendari. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa laporan kegiatan Kesbangpol, dokumen penanganan konflik, data konflik etnik, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak Kesbangpol, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan informasi yang dimaksud oleh informan. Transferabilitas dilakukan dengan menyajikan deskripsi penelitian secara rinci sehingga memungkinkan penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian serupa. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui *audit trail*, yaitu pencatatan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dan diverifikasi kembali.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data *(data display)*, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk

uraian naratif agar memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan berdasarkan teori peran J. Dwi Narwoko yang meliputi fungsi peran dalam pengendalian sosial, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial di daerah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena konflik etnik yang berulang antara suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari serta pentingnya peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat multietnis. Pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yang mencakup kegiatan wawancara, pengumpulan dokumentasi, analisis data, serta verifikasi temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari dalam Penanganan Konflik Etnik antara Suku Tolaki dan Suku Muna menggunakan konsep penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pencegahan Konflik

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran Kesbangpol dalam pencegahan konflik etnik melalui kegiatan deteksi dini konflik, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan pembinaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Kendari diperoleh informasi bahwa:

> "Kesbangpol secara rutin melakukan pemetaan potensi konflik yang berkembang di masyarakat, termasuk isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik antaretnik. Kami melibatkan tokoh adat Tolaki, tokoh masyarakat Muna, tokoh agama, serta aparat keamanan dalam melakukan deteksi dini."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemerintah yang menangani konflik ketika terjadi, tetapi juga berupaya melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah konflik sejak dini.

Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan pencegahan konflik dilakukan melalui forum diskusi, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta kegiatan pembinaan masyarakat yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam kegiatan tersebut

masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan menghormati keberagaman etnik di Kota Kendari.

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), sosialisasi wawasan kebangsaan, dan pertemuan lintas tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kesbangpol Kota Kendari. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran Kesbangpol dalam pencegahan konflik etnik antara Suku Tolaki dan Suku Muna telah berjalan cukup baik melalui kegiatan deteksi dini, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat sehingga mampu meminimalisir potensi konflik yang berkembang di masyarakat.

3.2 Penghentian Konflik

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran Kesbangpol dalam penghentian konflik melalui kegiatan mediasi, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Tolaki diperoleh informasi bahwa:

> "Ketika muncul ketegangan akibat isu yang berkembang di media sosial, pemerintah melalui Kesbangpol segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul di tengah masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Muna juga menunjukkan bahwa:

> "Kesbangpol selalu melibatkan tokoh masyarakat dari kedua etnik ketika terjadi persoalan yang berpotensi memicu konflik. Dengan adanya dialog tersebut, kesalahpahaman dapat diselesaikan secara musyawarah."

Berdasarkan observasi peneliti, proses penghentian konflik dilakukan melalui forum mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dari kedua etnik.

Dokumentasi penelitian menunjukkan adanya notulensi rapat koordinasi, surat undangan mediasi, serta berita acara kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Kesbangpol Kota Kendari.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol dalam penghentian konflik etnik dilakukan melalui pendekatan dialogis dan mediasi sehingga konflik yang muncul dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan kekerasan yang lebih luas.

3.3 Pemulihan Pascakonflik

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran Kesbangpol dalam pemulihan pascakonflik melalui kegiatan rekonsiliasi, penguatan hubungan sosial, dan pembinaan masyarakat pascaterjadinya konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesbangpol Kota Kendari diperoleh informasi bahwa:

"Setelah konflik mereda, tugas pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Kami terus melakukan pembinaan dan mempertemukan masyarakat agar hubungan sosial yang sempat terganggu dapat kembali harmonis."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol berupaya menciptakan hubungan sosial yang harmonis pascakonflik melalui berbagai kegiatan rekonsiliasi.

Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan rekonsiliasi dilakukan melalui dialog kebangsaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga hubungan yang harmonis antar masyarakat.

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya kegiatan deklarasi damai, pertemuan lintas etnik, serta kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat Tolaki dan Muna.

Penulis menemukan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut mampu membangun kembali rasa saling percaya di antara masyarakat yang sebelumnya mengalami ketegangan akibat konflik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol dalam pemulihan pascakonflik telah berjalan dengan baik melalui upaya rekonsiliasi dan pembinaan masyarakat sehingga hubungan sosial antar etnik dapat kembali harmonis.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari memiliki peran yang cukup strategis dalam penanganan konflik etnik antara Suku Tolaki dan Suku Muna melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Alam, Fauzi, 2024) yang menunjukkan bahwa Kesbangpol memiliki peran penting dalam penanganan konflik sosial melalui kegiatan deteksi dini, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas sosial di daerah

Pada tahap pencegahan konflik, Kesbangpol melaksanakan berbagai kegiatan seperti deteksi dini terhadap potensi konflik, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta pembinaan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di lingkungan sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak dini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap penghentian konflik, Kesbangpol berperan sebagai fasilitator dan mediator dengan mempertemukan pihak-pihak yang berpotensi terlibat konflik melalui forum dialog dan musyawarah. Melalui pendekatan tersebut, berbagai permasalahan dan kesalahpahaman yang muncul dapat dibahas secara terbuka sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan sosial dan politik yang mampu mengatasi akar permasalahan konflik secara komprehensif sebagaimana dijelaskan oleh (Rudiansyah, 2015) Selanjutnya, pada tahap pemulihan pascakonflik, Kesbangpol melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan

masyarakat guna memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Kegiatan tersebut dilakukan melalui dialog kebangsaan, pertemuan lintas etnik, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dari kedua kelompok etnik. Upaya tersebut mampu mendorong terbangunnya kembali rasa saling percaya dan memperkuat hubungan sosial antar masyarakat.

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal Kalosara sebagai sarana memperkuat hubungan antar kelompok masyarakat. Nilai budaya tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun komunikasi, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul secara damai. Keberadaan nilai budaya lokal ini menunjukkan bahwa pendekatan kearifan lokal masih memiliki peran yang kuat dalam menjaga keharmonisan masyarakat multietnik di Kota Kendari. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Kalosara masih relevan dan efektif sebagai kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan masyarakat multietnik. Pemanfaatan nilai budaya tersebut berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan mencegah terjadinya konflik antarkelompok. Temuan ini sejalan dengan (Hasna Azmi Fadhilah, Sutiyo, 2019) yang menegaskan pentingnya pelibatan lembaga adat dan nilai budaya lokal dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan konflik etnik antara Suku Tolaki dan Suku Muna tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah melalui Kesbangpol, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Ismail & Si, 2019) yang menyatakan bahwa integrasi bangsa dalam masyarakat yang majemuk memerlukan kolaborasi antara negara dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah berkembangnya konflik. Sinergi antar berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial, mencegah terjadinya konflik yang lebih luas, serta menjaga keharmonisan hubungan antar etnik di Kota Kendari.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari telah menjalankan perannya dalam penanganan konflik etnik antara Suku Tolaki dan Suku Muna melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pada tahap pencegahan konflik, Kesbangpol melaksanakan deteksi dini, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta pembinaan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan guna meminimalisir potensi konflik. Pada tahap penghentian konflik, Kesbangpol berperan sebagai mediator dengan memfasilitasi dialog dan musyawarah antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga ketegangan yang terjadi dapat diselesaikan secara damai. Sementara pada tahap pemulihan pascakonflik, Kesbangpol melaksanakan rekonsiliasi dan pembinaan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial serta memperkuat kembali persatuan di tengah masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan konflik etnik di Kota Kendari tidak hanya dipengaruhi oleh peran Kesbangpol, tetapi juga

didukung oleh keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, dan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal seperti Kalosara menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya perdamaian dan menjaga keharmonisan hubungan antar etnik di Kota Kendari.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat serta keterbatasan dalam memperoleh data dari seluruh pihak yang terlibat dalam konflik etnik antara Suku Tolaki dan Suku Muna. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari sehingga belum mengkaji secara mendalam peran lembaga lain dalam penanganan konflik etnik.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran lembaga lain seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh pemuda, maupun aparat keamanan dalam penanganan konflik etnik di Kota Kendari. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas untuk mengetahui efektivitas kolaborasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik etnik di masa yang akan datang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016). Masyarakat majemuk dan multikultural: Perspektif komunikasi. PT Remaja Rosdakarya.

Agus Subagyo, Y., & Rusfiana, Y. (2018). Sinergi TNI AD dengan Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial: Studi kasus Kota Tarakan. Jurnal Pemerintahan, 8(2), 113–126.

Ahmad, L., & Bolombo, P. (2021). Implementation of social conflict management in local government: A policy content analysis. *Journal of Public Affairs and Governance*, 11(2), 382–398. https://doi.org/10.5296/jpag.v11i2.18711

Alam, M., Fauzi, M., & Suryono, S. (2024). Peran kesatuan bangsa dan politik dalam menangani konflik sosial keagamaan di kabupaten Bandung Barat.

Jurnal Prinsip Pendidikan Demokrasi, 6(2), 145–162. https://doi.org/10.21009/prinsip.v6i2.29240

Badan Pusat Statistik Kota Kendari. (2024). Data statistik Kota Kendari 2024. BPS Kota Kendari.

Barron, P. (2004). *Local conflict in Indonesia: Measuring incidence and identifying patterns. World Bank East Asia and Pacific Region Report.*

Fadhilah, H. A., & Sutiyo. (2019). Peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat multikultural. *Indonesian Journal of Governance and Public Administration*, 4(1), 37–42. https://doi.org/10.31291/ijgpa.v4i1.643

Gunawan, I. K., Taufik, M., & Somlai, I. G. (2024). *Ethnic fractionalization and polarization in New Capital City of Nusantara, Indonesia: Analysis of potential conflict. Journal of Political Studies*, 11(3), 331–351.

Hartoyo, H., Sindung, H., Teuku, F., & Sunarto, S. (2020). *The role of local communities in peacebuilding in post-ethnic conflict in a multicultural society. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 12(1), 33–44. https://doi.org/10.1108/JACPR-06-2019-0419

Ismail, D., & Si, M. (2019). Konflik dan kolaborasi: Peran negara dalam integrasi bangsa. Media Nusa Creative.

Kesbangpol Kota Kendari. (2025). Laporan penanganan konflik etnik tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.

Liliweri, A. (2005). Prasangka dan konflik: Komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur. LKiS.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.*

Narwoko, J. D. (2012). Sosiologi teks pengantar dan terapan (3rd ed.). Prenada Media.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. Tentang penanganan konflik sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5.

Rudiansyah, D. (2015). Dimensi sosio-politik konflik Ambon pengantar. Jurnal Penelitian Politik, 10, 161–174.

Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kebangsaan, W. (2020). Konflik sosial dalam perspektif *collaborative governance*. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 3(2), 104–114.

Sumantri, I. M., Wirabayu, I. G., & Sugiartha, I. M. (2017). Analisis kebutuhan dalam pengembangan model pendidikan multikultur transformatif dalam pembelajaran PPKn dan IPS di sekolah dasar. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(3), 192. https://doi.org/10.23887/jere.v1i3.12017

Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Integrasi sosial dalam masyarakat multietnik: Studi kasus Kota Kendari. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 74–83.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Tentang penanganan konflik sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110.

Vitiara, M. D., Herdiansyah, H., & Frimawaty, E. (2025). *The role of local communities in managing environmental damage to address social conflicts*. *Journal of Environmental Management and Sustainable Development,* 8(2), 761–772. https://doi.org/10.1234/jemsd.2025.08.02.761